

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menghadapi fenomena transisi demografi yang signifikan saat ini, ditandai adanya peningkatan jumlah proporsi penduduk usia lanjut atau *aging population*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menjelaskan persentase lansia di Indonesia mencapai 12% atau 29 juta jiwa. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah hingga 19,2% di tahun 2045. Sejalan dengan proyeksi WHO, diperkirakan 80% lansia dunia pada tahun 2050 akan tinggal di negara-negara berkembang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan sosial lansia semakin mendesak, terutama dalam konteks perlindungan terhadap lansia yang rentan secara ekonomi dan sosial.

Pemerintah Indonesia merespons fenomena tersebut dengan menerapkan kebijakan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia perlu dilakukan secara efektif, berdampak nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan

sosial, kemudahan akses layanan dan fasilitas publik, serta pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial khusus untuk lanjut usia yang tidak mampu.

Kebijakan Pelayanan dasar bagi lansia juga diatur dalam Permensos No. 19 Tahun 2012. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penyediaan pelayanan dasar bagi lansia, seperti pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan tempat tinggal yang layak. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunjukkan kesenjangan antar wilayah, baik dari segi sumber daya, kapasitas kelembagaan, hingga efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia juga mengatur kebijakan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia. Peraturan ini menyatakan bahwa orang lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kemampuan yang sama dalam semua aspek kehidupan, dan memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Layanan keagamaan dan spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, akses yang mudah ke fasilitas umum, pelayanan dan bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penghargaan kepada orang tua adalah beberapa dari

layanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan geriatri dan fasilitas ramah lansia, sementara kesempatan kerja diberikan untuk mendayagunakan pengalaman dan keahlian lanjut usia. Peraturan ini juga mengatur pemberian kemudahan layanan hukum dan jaminan sosial seperti asuransi kesejahteraan dan tunjangan berkelanjutan bagi lansia yang membutuhkan.

Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah pendirian Panti lansia di berbagai daerah. Panti lansia ini berfungsi sebagai fasilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lansia agar kualitas hidup dan kesejahteraannya meningkat. Penelitian oleh Akbar & Phahlevy (2021) mengungkap bahwa banyak pemerintah daerah yang belum memiliki regulasi spesifik terkait pelayanan lansia, sehingga perlindungan bagi kelompok rentan tersebut cenderung diabaikan. Masalah pelayanan lansia juga terlihat dalam konteks nasional. Menurut penelitian oleh Hati & Pratama (2022) Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program perlindungan sosial untuk orang tua. Selain itu, pelaksanaan kebijakan untuk orang tua terhambat oleh kurangnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam berbagai program, termasuk layanan di PPSLU, tidak berjalan dengan baik.

Tabel 1. 1 Data Nilai IKM Pelayanan Panti Lansia di Indonesia 2024

<b>Peringkat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Nilai IKM</b>
1	Kalimantan Timur	75.0
2	Jawa Barat	78.5
3	Jawa Timur	82.0
4	Jawa Tengah	85.0
5	DKI Jakarta	87.0
6	Sulawesi Selatan	88.0
7	Bali	90.0

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai IKM terendah diperoleh provinsi Kalimantan Timur dan tertinggi diperoleh Provinsi Bali. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 4 yang menunjukkan nilai IKM tingkat sedang setelah Jawa Timur. Meskipun Jawa Tengah memiliki skor IKM yang relatif baik dibandingkan provinsi lain (sekitar 85,0), masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan fasilitas dan kurangnya jumlah sumber daya manusia di panti lansia yang masih kurang memadai. Ketimpangan fasilitas di panti lansia dapat dilihat melalui perbandingan fasilitas di tiap panti.



Gambar 1. 1 Lokasi Panti Lansia di Cepiring Kabupaten Kendal  
Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi Penulis

Jawa Tengah memiliki jumlah panti dan populasi lansia yang relatif besar, namun pada beberapa panti, termasuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring, masih terdapat kendala pada aspek tata ruang dan infrastruktur. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah jarak antar gedung yang relatif berjauhan, sehingga berpotensi menghambat mobilitas lansia serta efektivitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga pendamping. Kondisi ini



Kabupaten Kendal belum mencapai tingkat kualitas dan pelayanan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Nilai tingkat capaian pelayanan kesehatan lansia di Kabupaten Kendal belum mencapai skor 80, menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam penyebaran fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada orang tua di wilayah tersebut. Selain itu, distribusi fasilitas dan kualitas tenaga kerja di panti lansia Kabupaten Kendal masih tergolong rendah terlihat dari rendahnya nilai pada indikator layanan dan mutu dibandingkan daerah lain seperti Kota Semarang atau Kota Surakarta dalam gambar tersebut. Penelitian di Kabupaten Kendal sangat relevan untuk mengidentifikasi lebih dalam faktor-faktor penyebab rendahnya pemerataan fasilitas serta kendala dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di panti lansia, sehingga dapat mendorong upaya peningkatan mutu pelayanan sosial lansia melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah setempat.

Kabupaten Kendal menempati posisi yang sangat rentan dalam konteks lansia di tingkat provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kendal tahun 2024, jumlah lansia di Kabupaten Kendal sekitar 145.752 dari total penduduk lansia yang ada di Jawa Tengah mencapai sekitar 5,28 juta jiwa. Kabupaten Kendal memiliki populasi lansia signifikan

yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan sosial dan kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya prevalensi penyakit kronis seperti hipertensi yang menjadi masalah utama lansia, yang berdampak pada peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan dukungan sosial. Oleh karena itu, Kendal merupakan wilayah strategis yang penting untuk kajian dan intervensi kebijakan guna meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik sosial dan demografis yang relevan dengan fenomena penuaan penduduk serta tantangan pelayanan sosial lansia.

NO	PERMASALAHAN	NILAI SKALA KRITERIA					TOTAL SKOR	RANGKING
		KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4	KRITERIA 5		
1	Belum Optimalnya Penanganan Kesejahteraan Sosial	20	20	20	15	25	100	1
2	Belum Optimalnya Penanganan Penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitas	20	20	15	15	20	90	2
3	Belum Optimalnya Penanganan Lanjut Usia	20	15	15	15	20	85	3
4	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial	20	15	15	15	19	84	4

Gambar 1. 3 Laporan Penilaian Kriteria Pelayanan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Kendal

Sumber: Website Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2023

Berdasarkan data matriks penilaian skala kriteria di atas, urgensi penanganan berbagai problematika sosial di Kabupaten Kendal yang memiliki skor akumulasi tinggi, dengan rentang skor antara 84 hingga 100. Prioritas utama terletak pada belum optimalnya penanganan kesejahteraan sosial yang menempati

peringkat pertama dengan skor sempurna (100), disusul oleh isu pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Panti Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) berperan sebagai institusi yang menyediakan layanan pemeliharaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi lansia yang tidak mampu atau terlantar. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi seperti kurangnya anggaran, tenaga kerja, sarana prasarana, serta Kerja sama antar pihak terkait, yang dapat mengurangi efektivitas pelayanan. PPSLU di Kecamatan Cepiring menjadi salah satu wadah utama untuk pelayanan lansia. Kecamatan ini memiliki karakteristik demografis dengan populasi lansia yang signifikan, terutama di daerah pedesaan yang rentan terhadap masalah sosial ekonomi. Meskipun kebijakan nasional dan daerah telah dirancang untuk mendukung pelayanan ini, laporan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2025 memperlihatkan adanya perbedaan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan, seperti kurangnya pemantauan, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik lansia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kualitas hidup lansia.

Berdasarkan data dari Dispendukcapil Tahun 2024, jumlah

lansia kategori usia 60 tahun ke atas di Kecamatan Cepiring sekitar 7.488 jiwa dari 145.752 lansia di Kabupaten Kendal. Data ini menunjukkan proporsi lansia yang signifikan di wilayah tersebut, yang mendukung kebutuhan layanan sosial lansia yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kapasitas dan efektivitas pelayanan di PPSLU Cepiring. Jumlah lansia yang ada tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia, dimana hal tersebut berdampak pada keterbatasan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.



Gambar 1. 4 Survei Kepuasan Masyarakat PPSLU Cepiring Tahun 2024

Sumber: Website PPSLU Cepiring

Berdasarkan data dari website PPSLU Cepiring dapat dilihat dalam gambar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 di PPSLU Cepiring memperoleh total nilai 89,75 dan dalam kategori A atau Sangat Baik. Survei kepuasan tersebut menilai 9 aspek berdasarkan standar pelayanan yang ada di PPSLU Cepiring. Aspek tersebut meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana

prasarana, dan penanganan pengaduan. Hasil survei tersebut diambil dari 80 responden dengan cara menyebar kuesioner kepada keluarga penerima manfaat di PPSLU Cepiring. Berdasarkan hasil survei dapat dilihat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 di PPSLU Cepiring memiliki skor tertinggi pada aspek Kompetensi Pelaksana yaitu 91 poin dan skor terendah ada pada aspek Sarana Prasarana yaitu 88 poin.

Aspek sarana prasarana terlihat lebih rendah dibanding aspek lainnya, menunjukkan bahwa aspek tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelayanan bagi para lansia dapat berlangsung lebih optimal dan nyaman. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun secara umum pelayanan memperoleh predikat sangat baik, kebutuhan fasilitas fisik yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan aktivitas harian para lansia masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada konteks pelayanan lansia di panti, sarana prasarana memiliki peran penting karena lansia membutuhkan lingkungan yang ramah usia yang meliputi aksesibilitas ruang, peralatan kesehatan, tempat tinggal yang aman, area kegiatan yang layak, serta fasilitas pendukung mobilitas. Kekurangan pada aspek ini dapat berdampak pada kualitas hidup lansia, efektivitas pelayanan, serta kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, meningkatkan sarana prasarana merupakan salah satu

hal yang harus diperhatikan agar panti mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan para penghuni lanjut usia.

Berdasarkan jurnal Penelitian oleh Anggraeni & Jati (2024) menunjukkan bahwa meskipun PPSLU Cepiring memiliki infrastruktur fisik berupa bangunan asrama, klinik, ruang makan, aula, dan fasilitas dasar lainnya, lansia di sana masih mengalami hambatan mobilitas atau hambatan jalan bagi lansia dengan gangguan mobilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas belum sepenuhnya memadai untuk kebutuhan geriatri khusus. Sementara berdasarkan penelitian dari Arbianto & Adriani (2023) menemukan bahwa berdasarkan lima indikator kualitas pelayanan di PPSLU Dewanata Cilacap berada pada kategori “baik” berkat ketersediaan fasilitas fisik yang memadai serta pelayanan yang lebih terstruktur. Selain itu, dalam jurnal penelitian Arbianto menunjukkan bahwa implementasi terapi fisik dan geriatri di PPSLU Dewanata Cilacap, termasuk latihan mobilitas dan manajemen kesehatan kronis, berjalan efektif karena adanya dukungan sarana kesehatan dan tenaga pendamping terlatih. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat perbandingan di PPSLU Cepiring dan PPSLU Dewanata Cilacap dimana dari sisi fasilitas dan kualitas pengelolaan di PPSLU Dewanata Cilacap lebih komprehensif dibanding PPSLU Cepiring yang masih

berfokus pada pemenuhan dasar tanpa dukungan sistem layanan kesehatan yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa PPSLU Cepiring belum sepenuhnya menerapkan kebijakan secara optimal sesuai Permensos No. 19 Tahun 2012.

Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan terkait sarana prasarana juga terlihat dengan panti lansia di Jogja. Berdasarkan jurnal dari Kurniawati et al (2024) dan beberapa penelitian intervensi lansia lainnya periode 2022– 2025, PPSLU Tresna Werdha Abiyoso Yogyakarta menunjukkan kecukupan fasilitas yang lebih baik, terutama karena tersedianya layanan terapi hortikultura, kegiatan fisik terstruktur, program seni-budaya seperti gamelan, serta fasilitas rehabilitasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup penghuni. PPSLU Tresna Werdha Abiyoso Yogyakarta lebih unggul dibanding PPSLU Cepiring karena memiliki fasilitas modern seperti kamar pribadi, pusat rekreasi lengkap, serta rumah sakit mini dengan layanan medis dan rehabilitasi komprehensif, serta didukung teknologi pemantauan kesehatan digital. Sementara itu, PPSLU Cepiring hanya menyediakan fasilitas dasar seperti kamar bersama, ruang makan sederhana, ruang rekreasi terbatas, dan klinik kecil.

Berdasarkan jurnal dari Uda et al (2016) PPSLU Tresna Werdha Abiyoso Yogyakarta memiliki kualitas SDM yang relatif lebih baik karena sebagian besar tenaga perawat dan pendamping

lansia telah tersertifikasi gerontik, memperoleh pelatihan rutin mengenai terapi non- farmakologis, serta mengikuti supervisi berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, berdasarkan jurnal dari Anggraeni & Jati (2024) PPSLU Cepiring masih mengalami keterbatasan SDM, terutama pada kurangnya tenaga profesional seperti perawat geriatri, pekerja sosial bersertifikat, dan terapis fisik. Kondisi tersebut membuat kapasitas layanan berbasis kebutuhan individu di PPSLU Cepiring belum sepenuhnya optimal seperti di PPSLU Tresna Werdha Abiyoso Yogyakarta yang telah mengembangkan model peningkatan kompetensi terintegrasi melalui pelatihan, mentoring, dan kolaborasi lintas lembaga. Perbedaan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas SDM di PPSLU Cepiring agar mendekati standar nasional seperti di Abiyoso.

Pelaksanaan Kebijakan pelayanan sosial lansia telah di PPSLU Cepiring mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Peraturan ini menetapkan enam bentuk layanan komprehensif yang harus disediakan oleh setiap PPSLU, yaitu pelayanan dasar, pelayanan rehabilitasi sosial, dukungan psikososial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan advokasi sosial. Pelayanan dasar mencakup pemenuhan kebutuhan primer lansia seperti tempat tinggal, makanan bergizi, pakaian, dan kebutuhan sehari- hari

lainnya.

Pelayanan rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan dan pengembangan kemampuan fisik, mental, dan sosial para lansia agar dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan psikososial meliputi konseling, terapi kelompok, dan aktivitas rekreasi yang bertujuan menjaga kesehatan mental dan emosional lansia. Sementara itu, pelayanan kesehatan mengintegrasikan layanan medis rutin, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penanganan kondisi medis khusus yang umum dialami lansia. Pemberdayaan sosial fokus pada pengembangan potensi dan kemampuan lansia melalui berbagai kegiatan produktif dan kreatif. Terakhir, advokasi sosial bertujuan melindungi hak-hak lansia dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan bermartabat.

Implementasi kebijakan pelayanan sosial di PPSLU Cepiring menghadapi beberapa tantangan utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala mendasar yang mempengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kedua, infrastruktur yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang memadai, terutama dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan. Rendahnya rasio pekerja sosial terhadap jumlah penghuni panti juga menjadi permasalahan serius yang menghambat efektivitas pendampingan individual. Adanya

keterbatasan jumlah pekerja sosial, pendampingan intensif dan personal yang dibutuhkan setiap lansia sulit untuk direalisasikan secara optimal. Ketimpangan infrastruktur ini menciptakan disparitas kualitas pelayanan antara penghuni yang berbeda. Kendala lain di PPSLU Cepiring yaitu minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi membuat staf PPSLU Cepiring belum mampu menangani kebutuhan kesehatan dan psikososial lansia secara optimal. Keterbatasan keterampilan ini menurunkan kualitas layanan dan menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan yang lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki peluang strategis untuk menjadikan PPSLU Cepiring sebagai model inovasi pelayanan sosial lansia yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Peluang ini tidak hanya bisa meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kendal, tetapi juga bisa membantu mencapai tujuan nasional dalam bidang kesejahteraan lansia. Untuk mewujudkan transformasi ini, diperlukan komitmen yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, dan kerja sama multisektoral yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Jika aspek tersebut telah terpenuhi PPSLU Cepiring dapat berkembang menjadi institusi pelayanan sosial lansia yang unggul dan selaras dengan kebutuhan lansia dan juga mengalami peningkatan tentang kesejahteraan lansia.

Kebijakan nasional dan daerah seperti Undang-Undang No.

13 Tahun 1998, Permensos No. 19 Tahun 2012, serta Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2014 telah mengatur pelayanan sosial lansia secara komprehensif di PPSLU, termasuk enam bentuk layanan utama (pelayanan dasar, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial, kesehatan, pemberdayaan, dan advokasi), pelaksanaannya di PPSLU Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal masih menunjukkan ketidakefektifan, seperti terlihat dari survei kepuasan masyarakat tahun 2024 yang mencatat skor terendah pada aspek sarana prasarana (88 poin) meskipun secara keseluruhan 89,75 (kategori sangat baik), rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan lansia di Kendal di bawah 80 dibandingkan kabupaten lain, serta keterbatasan fasilitas geriatri, rasio SDM rendah, dan minimnya pelatihan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan 7.488 lansia di wilayah tersebut. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas panti lansia di daerah lain seperti Cilacap dan Yogyakarta tanpa fokus mendalam pada faktor pendukung-penghambat implementasi kebijakan spesifik di PPSLU Cepiring, sehingga terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui studi ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis empiris guna meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan lansia secara holistik.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui sejauh

mana kebijakan pelayanan sosial lanjut usia telah dilaksanakan secara efektif di PPSLU Kecamatan Cepiring, serta dapat mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan yaitu “Mengapa implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal belum berjalan optimal?”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Keterbatasan tenaga profesional sehingga staf mengalami beban kerja tinggi dan pelayanan terhadap lansia sering tidak optimal.
2. Adanya kendala dalam hal ketersediaan fasilitas, termasuk akses antar ruang yang tidak ramah lansia.
3. Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga kemampuan staf dalam menangani kebutuhan kesehatan dan psikososial lansia masih terbatas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan sosial

lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring?

2. Apa faktor keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di Kabupaten Kendal.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan terkait upaya yang dilakukan pengelola panti sosial lansia dan dinas sosial dalam melaksanakan kebijakan pelayanan sosial lansia.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial lansia di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

b. Bagi Instansi

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penilaian bagi dinas sosial dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial lansia.

c. Bagi Masyarakat

Temuan dari penelitian dapat membantu memberikan pemahaman mengenai peningkatan kualitas pelayanan sosial lansia di panti sosial lansia, serta mendorong kepedulian dan kesejahteraan lansia di Kabupaten Kendal.

## 1.6 Kerangka Teoritis

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 State Of The Art

No.	Judul	Latar Belakang	Hasil dan Diskusi	Kesimpulan
1.	Judul: Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Banyumas. Penerbit: JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Penulis : Yuli Tirtariandi El Anshori & Saleha	Studi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian terhadap lansia di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah lansia namun minimnya regulasi yang memadai di sebagian besar daerah. Meskipun Kabupaten Banyumas memiliki Perda Kesejahteraan Lansia, penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan tersebut, mengingat masih banyaknya lansia terlantar, khususnya perempuan dan penanganan yang belum merata di seluruh desa.	Implementasi Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 belum optimal karena keterbatasan anggaran untuk Panti Werdha dan kurangnya koordinasi antar dinas terkait dengan institusi lain, kecuali Kecamatan Kalibagor yang aktif berkoordinasi dengan desa. Oleh karena itu, diperlukan alokasi dana yang memadai untuk pembangunan Panti Werdha milik pemerintah kabupaten dan	Implementasi kebijakan kesejahteraan lansia di Kabupaten Banyumas sejak 2014 belum optimal karena kurangnya alokasi anggaran untuk Panti Werdha dan koordinasi yang belum maksimal antar dinas terkait, meskipun Kecamatan Kalibagor telah aktif berkoordinasi dengan desa. Masalah ekonomi menyebabkan banyaknya perempuan lansia terlantar di Kecamatan Kalibagor, sehingga perlu adanya alokasi dana yang memadai untuk pembangunan

	Tahun terbit : 2023		peningkatan koordinasi antar dinas dengan satuan pemerintahan di bawahnya untuk mengatasi permasalahan lansia terlantar, khususnya perempuan lansia, di Kecamatan Kalibagor.	Panti Werdha milik pemerintah kabupaten dan peningkatan koordinasi antara dinas terkait dengan pemerintahan di tingkat bawah.
2.	Judul: Implementasi Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur  Penerbit: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 5 No. 06	Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan fungsi sosial.	Kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang krusial secara optimal sangat vital bagi suksesnya proses penerapan kebijakan. Dalam konteks penerapan kebijakan, sumber daya mencakup ketersediaan tenaga kerja, dana, serta fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, yang semuanya berdampak besar terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngada masih mengalami	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah memiliki landasan tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, serta keberfungsian

	<p>November (2025)</p> <p>Penulis: Maria Theresia Achluddin Rochim, Radjikan</p> <p>Tahun terbit: 2025</p>		<p>kekurangan jumlah tenaga pelaksana yang secara spesifik menangani program untuk lansia, sehingga beban tugas yang ditanggung oleh staf menjadi cukup berat dan membatasi luasnya layanan untuk semua lansia yang memerlukannya.</p>	<p>sosial lanjut usia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemahaman kelompok sasaran terhadap tujuan program masih tergolong terbatas, karena sebagian besar lanjut usia hanya memaknai program tersebut sebagai bentuk bantuan sosial semata, tanpa memahami orientasi jangka panjang dari program rehabilitasi sosial, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan realitas pemahaman masyarakat.</p>
3.	<p>Judul: Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Lansia di Kecamatan Pabuaran</p> <p>Penerbit: Journal of</p>	<p>Peningkatan jumlah lansia di Indonesia, khususnya tantangan seperti kemiskinan dan penelantaran pada lansia terlantar berusia di atas 60 tahun, yang memerlukan program perlindungan sosial seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk</p>	<p>Implementasi Program ATENSI permakanaan lansia di Kecamatan Pabuaran melibatkan 50 penerima manfaat (usia 75+ tahun, terdaftar DTKS), dengan pengantaran dua porsi makanan harian oleh POKMAS, dianalisis melalui teori</p>	<p>Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial ATENSI permakanaan lansia di Kecamatan Pabuaran belum optimal karena hambatan pada komunikasi (kurang sosialisasi), sumber daya (SDM dan anggaran terbatas), serta struktur</p>

	<p>Geopolitics and Public Policy</p> <p>Penulis: Nur Rizky Putri Ismaya dan Yeni Widyastuti</p> <p>Tahun terbit: 2025</p>	<p>memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian difokuskan pada implementasi program permakanan lansia di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pengantaran makanan bergizi harian, namun menghadapi hambatan seperti kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia, dan anggaran.</p>	<p>Edward III: komunikasi kurang sosialisasi tapi konsisten, sumber daya terbatas (SDM hanya 4 pendamping, anggaran Rp44,6 juta/bulan), disposisi pelaksana baik dan empati tinggi, serta struktur birokrasi dengan SOP jelas namun monitoring minim. Pembahasan mengungkap faktor pendukung seperti komitmen POKMAS dan SOP, sementara penghambat utama adalah keterbatasan SDM, anggaran, fasilitas pengiriman, serta sosialisasi yang menimbulkan kecurigaan politik, sehingga program belum optimal.</p>	<p>birokrasi (monitoring minim), meskipun disposisi pelaksana baik. Diperlukan peningkatan sinergi antarlembaga, pelatihan SDM, dan alokasi anggaran lebih memadai untuk memastikan program berjalan efektif bagi kesejahteraan lansia terlantar.</p>
4.	<p>Judul: Strategi dan Implementasi</p>	<p>Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan peningkatan jumlah lansia</p>	<p>Strategi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar di Sidoarjo</p>	<p>Kondisi lansia terlantar di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki</p>

	<p>Program Rehabilitasi Sosial Bagi Lansia terlantar Oleh Dinas Sosial Sidoarjo</p> <p>Penerbit: Jurnal PUBLIQUE</p> <p>Penulis: Putri Unzilatur Rochmah</p> <p>Tahun terbit: 2025</p>	<p>terlantar yang mengalami permasalahan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi akibat penuaan penduduk yang cepat serta perubahan struktur keluarga. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menjalankan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian para lansia tersebut.</p>	<p>menggunakan pendekatan pemberdayaan, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor yang mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan pelatihan keterampilan. Implementasi program ini dilaksanakan melalui tahapan identifikasi data dari tingkat desa hingga verifikasi oleh Kementerian Sosial, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta kurangnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat.</p>	<p>kerentanan tinggi terhadap masalah fisik, psikis, sosial, dan ekonomi memerlukan penanganan khusus melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Meskipun berbagai layanan optimal telah diberikan, keberhasilan program tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> serta peningkatan kesadaran masyarakat.</p>
5.	<p>Judul: Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Kebijakan sosial untuk lanjut usia terlantar seringkali menghadapi kendala implementasi akibat desain</p>	<p>Analisis menggunakan value-critical approach menunjukkan bahwa desain kebijakan Layanan</p>	<p>Desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial di PPSLU Sudagaran Banyumas</p>

	<p>Lanjut Usia Terlantar Berbasis Panti Menggunakan Value-Critical Approach Penerbit: <i>Share Social Work Journal</i> Penulis: Ode Esa Sinarta, Binahayati Rusyidi, Soni Akhdad Nulhaqim Tahun terbit: 2025</p>	<p>kebijakan yang kurang memadai, seperti yang terlihat pada berbagai panti pelayanan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara kritis desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial di PPSLU Sudagaran Banyumas menggunakan value-critical approach guna mengidentifikasi kelemahan berbasis nilai seperti keadilan dan efisiensi.</p>	<p>Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial di PPSLU Sudagaran Banyumas telah sesuai dengan masalah sosial dan memiliki keunggulan pada aspek efisiensi target serta kejelasan mekanisme layanan. Namun, kebijakan ini masih memiliki kelemahan signifikan seperti ketiadaan indikator keberhasilan kuantitatif, potensi stigmatisasi penerima manfaat, rendahnya partisipasi lansia dalam pengambilan keputusan, serta risiko tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.</p>	<p>masih memiliki kelemahan signifikan, terutama terkait ketiadaan indikator kuantitatif yang terukur, potensi stigmatisasi bagi lansia, serta kurangnya partisipasi penerima manfaat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ditemukan pula masalah berupa kuota layanan yang terbatas serta risiko tumpang tindih yang tinggi antara program daerah dengan kebijakan sosial serupa dari pemerintah pusat.</p>
6.	<p>Judul: Implementasi Kebijakan bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p>	<p>Permasalahan lansia di Indonesia semakin kompleks, dengan prediksi jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat signifikan dari tahun ke</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di</p>	<p>Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat menunjukkan</p>

	<p>Lanjut Usia di Kelurahan Kuningan Barat</p> <p>Penerbit: Jurnal Transformasi Humaniora</p> <p>Penulis: Yuda Romadhon, Moh. Amin Tohari</p> <p>Tahun terbit: 2024</p>	<p>tahun, mencapai 17,9% pada tahun 2024. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk lansia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui bantuan sosial yang terstruktur.</p>	<p>Kelurahan Kuningan Barat melibatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berfungsi dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antara pemangku kepentingan. Selain itu, faktor-faktor seperti karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan berperan penting dalam mempengaruhi efektivitas program, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di wilayah tersebut.</p>	<p>bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan penting dalam keberhasilan program. Meskipun terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia, faktor-faktor seperti karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan kebijakan turut mempengaruhi efektivitas program tersebut.</p>
7.	<p>Judul: Peningkatan Kualitas Hidup</p>	<p>Dunia saat ini sedang mengalami transisi demografi menuju populasi</p>	<p>Implementasi pelayanan sosial bagi lansia di Kabupaten</p>	<p>Implementasi pelayanan sosial bagi lanjut usia di Kabupaten Banyumas</p>

<p>Lansia: Implementasi Prinsip Hak Lansia Melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia Penerbit: Jurnal Masyarakat Madani Penulis: Asyabudin, Imam Alfi, Ageng Widodo Tahun terbit: 2024</p>	<p>yang menua, termasuk di Indonesia di mana persentase lansia meningkat dua kali lipat dalam lima dekade terakhir. Kondisi ini menuntut adanya perubahan kebijakan dan pelayanan sosial guna menangani penurunan kemampuan fisik serta kerentanan lansia, khususnya di Kabupaten Banyumas yang proporsi penduduk tuanya sudah melebihi tingkat nasional.</p>	<p>Banyumas telah menerapkan lima prinsip utama PBB yang meliputi kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan martabat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti posyandu lansia, bantuan tunai bersyarat (PKH), serta layanan berbasis panti (PPSLU) yang menjamin akses kesehatan, perlindungan hukum, dan pengembangan potensi diri bagi para lansia.</p>	<p>telah berhasil menerapkan lima prinsip utama PBB, yakni kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan martabat, guna meningkatkan kualitas hidup para lansia. Pencapaian ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Posyandu Lansia, Program Keluarga Harapan (PKH), serta layanan berbasis panti yang menjamin pemenuhan hak dasar, kesehatan, hingga perlindungan hukum secara adil dan bermartabat.</p>
---	---	---	---

8.	<p>Judul: Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan</p> <p>Penerbit: Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi</p> <p>Penulis: Yusuf Krisman Gea, Santoso Tri Raharjo, Gigin Ginanjar Kamil Basar</p> <p>Tahun Terbit: 2024</p>	<p>Peningkatan populasi lansia di Indonesia menjadi perhatian utama karena menimbulkan berbagai masalah terkait gaya hidup, kesehatan, dan peran sosial, yang seringkali menyebabkan keterlantaran. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui kebijakan dan program pelayanan sosial, seperti di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan komprehensif agar lansia dapat menikmati masa tua dengan baik.</p>	<p>Program pelayanan sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan memberikan manfaat signifikan bagi lansia terlantar, termasuk tempat tinggal aman dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendukung masa tua yang produktif. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan sosial.</p>	<p>Program pelayanan sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan memberikan manfaat signifikan bagi lansia terlantar, meliputi tempat tinggal aman, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembinaan yang produktif. Namun, implementasi program ini masih menghadapi kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan sosial.</p>
9.	<p>Judul: Efektivitas Pelayanan Sosial</p>	<p>Peningkatan jumlah lansia di Indonesia, yang rentan terhadap</p>	<p>Implementasi kebijakan kesejahteraan sosial bagi</p>	<p>Pelayanan sosial lanjut usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota</p>

	<p>Lanjut Usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung  Penerbit: PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial  Penulis: Juli Kriswanto Jhonpra Volta Duha, Dede Kuswanda, Endah Dwi Winarni  Tahun Terbit: 2023</p>	<p>perubahan fisik, mental, dan sosial, menimbulkan kebutuhan akan pelayanan sosial yang lebih besar. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan lansia melalui berbagai kebijakan dan program pelayanan sosial, termasuk di panti pelayanan sosial lanjut usia. Namun, efektivitas pelayanan ini perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan meningkatkan kualitas layanan demi kesejahteraan lansia secara optimal.</p>	<p>penyandang disabilitas di Kota Medan menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, seperti kendala pemetaan sosial dan minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan program. Oleh karena itu, peningkatan komitmen, pemahaman dari semua pihak terkait, serta perbaikan struktur birokrasi dengan SOP yang jelas sangat krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.</p>	<p>Bandung dinilai sangat efektif, namun terdapat masalah pada ketepatan waktu pelayanan kesehatan dan program pengisian waktu luang. Oleh karena itu, diusulkan program peningkatan efektivitas pengisian waktu luang melalui peningkatan kapasitas pegawai, identifikasi minat lansia, dan demonstrasi kegiatan untuk meningkatkan kebahagiaan lansia.</p>
10.	<p>Judul: Analysis of China's Smart Elderly Care Service</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi penuaan populasi global yang semakin parah, termasuk di</p>	<p>Hasil dan pembahasan jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan layanan</p>	<p>Meskipun kerangka dasar layanan perawatan lansia cerdas telah terbentuk, distribusinya masih</p>

	<p>Policy: Based on the Three-dimensional Framework  Penerbit: SAGE Open  Penulis: Xiaokun Sun  Tahun terbit: 2024</p>	<p>Tiongkok yang menghadapi fenomena "menjadi tua sebelum menjadi kaya," sehingga layanan perawatan lansia cerdas berbasis teknologi informasi modern menjadi solusi efektif untuk mengatasi tekanan jaminan sosial. Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor ini, kerangka kebijakan yang ada masih dianggap tidak seimbang dan membutuhkan analisis komprehensif guna mengoptimalkan sistem jaminan sosial bagi para lansia.</p>	<p>perawatan lansia cerdas di Tiongkok terus meningkat, distribusinya masih belum merata dengan fokus utama yang masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan keamanan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur alat kebijakan saat ini belum seimbang karena terlalu bergantung pada instrumen penawaran dan lingkungan, sementara dukungan terhadap rantai nilai industrialisasi serta pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri lansia masih perlu diperkuat.</p>	<p>belum merata karena terlalu fokus pada kebutuhan dasar fisik dan dukungan teknologi di tahap awal. Di masa depan, pemerintah perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan lansia (termasuk aspek sosial dan aktualisasi diri), mengoptimalkan kombinasi instrumen kebijakan, serta memperkuat integrasi seluruh rantai nilai agar layanan tersebut menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan.</p>
11.	<p>Judul:  Implementation of</p>	<p>Peningkatan jumlah lansia di Indonesia mencapai 11,75% dari total populasi</p>	<p>Program Rantang Kasih di Desa Pengatigan, Banyuwangi,</p>	<p>Pelaksanaan Program Rantang Kasih di Desa Pengatigan telah sesuai</p>

<p>the Rantang Kasih Program in Ensuring the Welfare of Poor Elderly Alone</p> <p>Penulis: Mohammad Yusuf Efendi, Putri Robiatul Adawiyah</p> <p>Tahun terbit: 2024</p>	<p>akibat fenomena aging population, yang menuntut kebijakan pendukung kesehatan, pemberdayaan, dan jaminan sosial melalui pendekatan Active Aging. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan jaminan sosial lansia, salah satunya Program Rantang Kasih di Kabupaten Banyuwangi yang memberikan makanan harian bagi lansia rentan untuk menjaga kesejahteraan mereka. Penelitian ini mengkaji implementasi program tersebut di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, guna mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.</p>	<p>dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah desa berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2021, dengan pemilihan penerima manfaat dari DTKS dan observasi lapangan, pendanaan APBDes, serta distribusi makanan harian oleh warung setempat ke rumah lansia rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka. Meski melibatkan berbagai pihak seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, program ini menghadapi tantangan kesesuaian menu makanan dengan kondisi fisik lansia, seperti kesulitan mengunyah, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk penyesuaian gizi dan kesehatan.</p>	<p>pedoman Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, termasuk penetapan lansia penerima manfaat berdasarkan kriteria prioritas. Perbedaan utama ada pada aspek pendanaan, di mana peraturan menyediakan dua skema: APBD Kabupaten Banyuwangi atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Desa Pengatigan memilih skema kedua melalui APBDes, yang ditetapkan via Surat Keputusan Kepala Desa yang mencantumkan daftar penerima manfaat dan sumber anggaran.</p>
---	---	--	---

Sumber : Jurnal yang diolah, 2026

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu umumnya menilai efektivitas pelayanan sosial lansia dari aspek program, kepuasan penerima manfaat, dan dukungan kebijakan di daerah yang fasilitasnya relatif memadai. Namun, studi-studi tersebut belum banyak menyoroti kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik lapangan di wilayah yang menghadapi keterbatasan riil. Sebaliknya, penelitian ini menilai efektivitas pelayanan sosial lansia dari aspek program, kepuasan penerima manfaat, dan dukungan kebijakan di daerah dengan fasilitas relatif memadai. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui analisis spesifik terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 di PPSLU Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal lokasi dengan populasi lansia signifikan (7.488 jiwa) dan capaian SPM pelayanan kesehatan di bawah 80% yang belum pernah dikaji secara empiris sebelumnya berbeda dari pendekatan umum atau komparatif lintas daerah pada studi pendahulu, penelitian ini mengungkap faktor kontekstual unik seperti ketimpangan sarana, keterbatasan tenaga profesional geriatri, serta ketidaksesuaian kapasitas panti dengan proporsi lansia di wilayah pedesaan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk optimalisasi pelayanan sosial lansia yang holistik dan adaptif terhadap dinamika demografis Provinsi Jawa Tengah, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di wilayah yang kurang mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pelaksana layanan.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014 :3) administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf pemerintah untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Sementara itu, Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6), memandang administrasi publik sebagai gabungan teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah berhubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya dan mendorong kebijakan publik untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial. Secara keseluruhan, administrasi publik adalah gabungan seni dan ilmu untuk merencanakan dan memperbaiki kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat melalui perencanaan dan perbaikan kebijakan, terutama dalam hal organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Pemerintah berfungsi sebagai pengatur yang aktif dan responsif dalam mengelola kepentingan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan publik, karena tujuan utama pemerintah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Administrasi publik juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat agar

lebih aktif terlibat dalam proses membuat keputusan dan menjalankan kebijakan publik. Amane et al. (2023) menekankan bahwa administrasi publik harus mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya publik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya integrasi antara perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan agar pelayanan berjalan dengan baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik merujuk pada ilmu yang ditujukan guna memperlancar penyediaan pelayanan publik. Masyarakat merasakan manfaat layanan tersebut setelah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pendapat para ahli, administrasi publik adalah sebuah cara yang menggabungkan teori dan praktik untuk mengatur sumber daya dan orang-orang yang bekerja untuk pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyusun, melaksanakan, dan mengatur kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator yang proaktif dan partisipatif sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi

sumber daya demi kesejahteraan publik. Dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia, prinsip-prinsip administrasi publik tersebut menjadi landasan utama untuk menyediakan layanan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan khusus lansia. Dengan pendekatan administrasi publik yang profesional dan partisipatif, pelayanan sosial bagi lansia dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memberdayakan lansia secara sosial dan ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan memenuhi harapan dan kebutuhan kelompok rentan tersebut.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Menurut pandangan Kuhn (1970) di karyanya yang berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*" paradigma didefinisikan sebagai suatu sudut pandang, kumpulan nilai, teknik, prinsip dasar, atau cara untuk menghadapi tantangan tertentu yang dipegang oleh komunitas ilmiah selama periode tertentu. Bidang Administrasi Publik adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, dan telah mengalami transformasi serta pembaruan seiring berjalannya waktu untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Setiap paradigma yang timbul mencerminkan perspektif para ahli akan peran dan hambatan dalam

Administrasi Publik untuk merespons permasalahan yang timbul. Meskipun sering kali terjadi pertentangan pada suatu paradigma, para akademisi secara generik mengidentifikasi empat perkembangan paradigma utama dalam Administrasi Publik.

Teori Administrasi Publik Klasik muncul pada abad ke-19 dan biasa disebut dengan paradigma awal atau paradigma politik- administrasi (1900- 1926). Paradigma ini memunculkan pertanyaan mengenai penempatan penyelenggaraan negara secara optimal, dimana tokoh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menegaskan Bahwasanya Birokrasi pemerintah harus menjadi penekanan utama dalam penyelenggaraan negara. Namun demikian, dikotomi politik- administrasi telah memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan profesional. Wacana kali ini menjelaskan konsep bahwa administrasi publik merupakan kajian ilmu politik yang lebih luas. Bidang Administrasi Publik menyaksikan lonjakan kredibilitas ilmiah sepanjang tahun 1920-an, sebagian besar disebabkan oleh publikasi berpengaruh seperti Pengantar Studi Administrasi Publik karya Leonard White. Buku penting White menganjurkan pemisahan politik dari urusan administratif, sehingga memperkuat kedudukan akademis

disiplin ilmu tersebut.

Paradigma kedua, berkembang dari tahun 1927 hingga 1937, menciptakan prinsip-prinsip administrasi negara yang mengeksplorasi kemajuan administrasi negara serta memenuhi pencapaian puncak reputasi. Sejak sekitar tahun 1930, konsep ini mulai menerima kontribusi dari bidang-bidang lainnya, termasuk manajemen serta industri. Paradigma ini memandang administrasi negara sebagai suatu disiplin yang mencakup seluruh aspek hidup. Tokoh pemikiran di masa ini termasuk Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follet, Frederick W. Taylor, memusatkan perhatian terhadap hubungan antara administrasi negara dengan manajemen. Paradigma ini mencapai puncaknya pada tahun 1937 melalui konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang dikenal melalui *tulisan Paper on the Science of Administration* oleh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick.

Ketiga yaitu paradigma yang juga dikenal sebagai teori neoklasik dari administrasi negara, berkembang sekitar tahun 1950- 1970. Fase ini mencoba mendefinisikan hubungan antara ilmu politik dan administrasi, menekankan bahwa administrasi negara adalah bagian integral atas ilmu

politik. Seiring berjalannya waktu, administrasi negara dilihat sebagai sebuah disiplin yang berdiri sendiri. Paradigma ketiga mencoba mengatasi identitas krisis yang dihadapi oleh administrasi publik selama masa ini.

Paradigma keempat, yang muncul antara tahun 1956 dan 1970, mengkonsepkan administrasi negara sebagai bidang studi dalam ranah ilmu administrasi. Pada era ini terjadi kemajuan yang signifikan dalam perkembangan konsep-konsep manajemen yang ditandai dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan komprehensif. Ini termasuk eksplorasi perilaku organisasi, analisis manajemen, dan pemanfaatan teknologi kontemporer. Bidang administrasi negara dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pengetahuan tentang administrasi yang murni dipengaruhi oleh aspek psikologi sosial, dan ilmu yang berkaitan dengan administrasi yang menekankan pada pemahaman kebijakan publik. Ide tentang organisasi menjadi perhatian utama dalam urusan pemerintahan pada masa ini Paradigma kelima muncul sejak tahun 1970, mengubah cara kita melihat administrasi negara selaku bentuk penyelenggaraan negara. Perkembangan administrasi negara bukan sekadar berpusat pada pandangan ilmiah semata, tetapi juga memasuki domain teori organisasi.

Dalam kerangka administrasi publik, fokus utamanya adalah pada pemahaman dinamika operasional, prinsip dasar organisasi, perilaku individu di dalam organisasi, dan proses yang kompleks dalam pengambilan keputusan organisasi.

Paradigma terbaru adalah paradigma *governance*, yang muncul sejak tahun 1980 dan meminimalkan peran negara dalam pembangunan, serta melibatkan aktor-aktor lain seperti swasta dan masyarakat. Paradigma ini sangat berfokus pada pengembangan kerjasama antara instansi pemerintah, sektor bisnis, dan komunitas untuk kemajuan masyarakat. Pemerintah sedang menginisiasi pelibatan sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam program pembangunan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Paradigma *governance* menjadi relevan dalam penelitian ini karena menekankan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia di panti pelayanan sosial lanjut usia ini termasuk dalam paradigma ketiga yaitu paradigma *New Public Service* (NPS). Paradigma ini menjelaskan pentingnya layanan publik yang berorientasi terhadap kebutuhan dan partisipasi

masyarakat, kolaborasi antara berbagai aktor, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pada konteks implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia di panti pelayanan sosial lanjut usia ini terlihat adanya upaya untuk mengintegrasikan layanan berbasis komunitas, memperkuat peran *stakeholder* lokal, dan mendorong inovasi pelayanan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia. Ini sesuai dengan aturan NPS yang menganggap masyarakat sebagai partner penting dalam proses layanan publik, bukan hanya sebagai sasaran kebijakan. Paradigma administrasi publik yang mendasari kajian PPSLU adalah paradigma baru yang menekankan pelayanan publik berbasis nilai, partisipasi, dan kolaborasi, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip *New Public Service*. Paradigma ini diyakini mampu menjawab tantangan pelayanan sosial lansia yang semakin kompleks di era perubahan demografi saat ini.

#### **1.6.4 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah konsep penting dalam ilmu administrasi publik yang berarti serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang memengaruhi masyarakat secara umum. Menurut Thomas Dye (1972) mendefinisikan kebijakan publik sebagai

*"whatever governments choose to do or not to do,"* yang menekankan aspek aktif maupun pasif dari campur tangan pemerintah dalam menyalurkan nilai-nilai sosial melalui keputusan yang bersifat nyata maupun simbolis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga melibatkan pembuangan sengaja terhadap isu-isu publik tertentu, yang mencerminkan prioritas politik serta keterbatasan dalam sumber daya.

Easton & Framework (1965) memandang kebijakan publik sebagai proses mengubah tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi keputusan yang mengikat melalui sistem politik. Konsep ini menjadikan kebijakan sebagai hasil utama dari berbagai masukan politik, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang memutuskan dalam menyalurkan barang-barang publik secara adil, termasuk hak-hak dasar lansia seperti layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Easton mengatakan bahwa kebijakan itu bersifat berubah-ubah, dipengaruhi oleh masukan dari masyarakat, sehingga harus terus diubah agar tetap memiliki dukungan dan kepercayaan.

Anderson (1975) menjelaskan kebijakan publik sebagai aspek penyelesaian masalah melalui siklus kebijakan yang terorganisasi, mulai dari mengidentifikasi isu hingga melakukan evaluasi. Definisi ini menyatukan berbagai unsur seperti tujuan

bersama, alat kebijakan (aturan, dana, struktur organisasi), serta pihak yang memiliki wewenang, sehingga kebijakan tidak hanya sekadar pernyataan, tetapi merupakan pola tindakan yang selaras dan konsisten. Anderson juga menekankan bahwa kebijakan publik bersifat strategis dan luas, melibatkan arahan umum yang menjadi dasar bagi keputusan operasional yang lebih spesifik.

Birkland (2016) memperdalam pemahaman dengan menekankan bahwa kebijakan publik adalah "*a statement of government intent to address a public issue through specific actions or inactions,*" yang melibatkan berbagai pihak terkait dan proses negosiasi.

Secara umum, definisi kebijakan publik menunjukkan kesamaan dalam menyatakan bahwa tindakan pemerintah memiliki sifat otoritatif, berfokus pada masalah, dan diwarnai nilai, meskipun ada perbedaan dalam penekanan pada aspek keputusan, sistematis, atau proses siklusnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah alat pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

### **1.6.5 Implementasi Kebijakan**

Penerapan kebijakan merupakan bagian penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik. George C. Edward III (1980), mengatakan "*in our approach to the*

*study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the predicondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?'*. George C. Edwards III mengatakan bahwa dalam pendekatan studi tentang penerapan kebijakan, abstraksi pernyataannya dimulai dari dua aspek utama. Pertama adalah kondisi-kondisi yang diperlukan agar kebijakan publik bisa berhasil, dan yang kedua adalah hambatan- hambatan utama yang menghalangi pencapaian keberhasilan tersebut.

Merujuk pada kerangka teori George C. Edward III, efektivitas proses ini sangat bergantung pada keterkaitan dinamis antara empat dimensi utama: komunikasi yang harus jelas, konsisten, dan terarah agar tidak menimbulkan ambiguitas bagi pelaksana; ketersediaan sumber daya yang mencakup kecukupan anggaran, fasilitas, serta kuantitas dan kompetensi personil; disposisi atau komitmen positif dari agen pelaksana dalam menginternalisasi tujuan kebijakan; serta struktur birokrasi yang efisien dengan prosedur operasional standar (SOP) yang terorganisir tanpa hambatan fragmentasi wewenang yang kaku. Kegagalan atau hambatan pada salah satu dimensi tersebut, seperti pesan yang tidak sinkron, keterbatasan dana, atau sikap apatis pelaksana,

secara teoretis akan menciptakan celah antara rancangan normatif kebijakan dengan realisasi hasil di lapangan.

Rancangan awal kebijakan mencakup semua fungsi yang tercantum dalam dokumen, sedangkan rancangan akhir kebijakan mencakup semua fungsi namun dapat berupa tambahan atau perubahan yang terjadi selama masa implementasi, yaitu faktor komunikasi, daya dukung, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut berinteraksi secara dinamis dan memengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi adalah hal penting dalam menerapkan kebijakan. Cara berkomunikasi yang baik dan jelas antara orang yang membuat kebijakan, orang yang menjalankannya, dan orang yang mendapat manfaatnya bisa membuat semua pihak saling memahami tujuan serta cara kerja kebijakan tersebut Wilar et al. (2021). Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan Djafar et al. (2024). Oleh karena itu, koordinasi dan penyampaian informasi yang konsisten menjadi faktor pendorong utama keberhasilan implementasi.

Proses pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sumber daya. Sumber daya menurut Winarno (2016 :184) mencakup staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Sumber daya terbatas sering menjadi hambatan utama, menyebabkan program

gagal dan tujuan kebijakan sulit dicapai. Oleh karena itu, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang baik adalah dua komponen penting yang membantu pelaksanaan kebijakan.

Disposisi pelaksana, yang meliputi sikap, motivasi, dan komitmen kebijakan memiliki peran penting. Rahmadhani et al (2024) menekankan bahwa sikap positif dan dedikasi tinggi dari pekerja sosial dan pejabat pemerintah berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program pelayanan sosial lansia. Sebaliknya, sikap apatis atau kurangnya komitmen dapat menjadi hambatan dalam implementasi Pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia menjadi strategi penting untuk meningkatkan disposisi pelaksana.

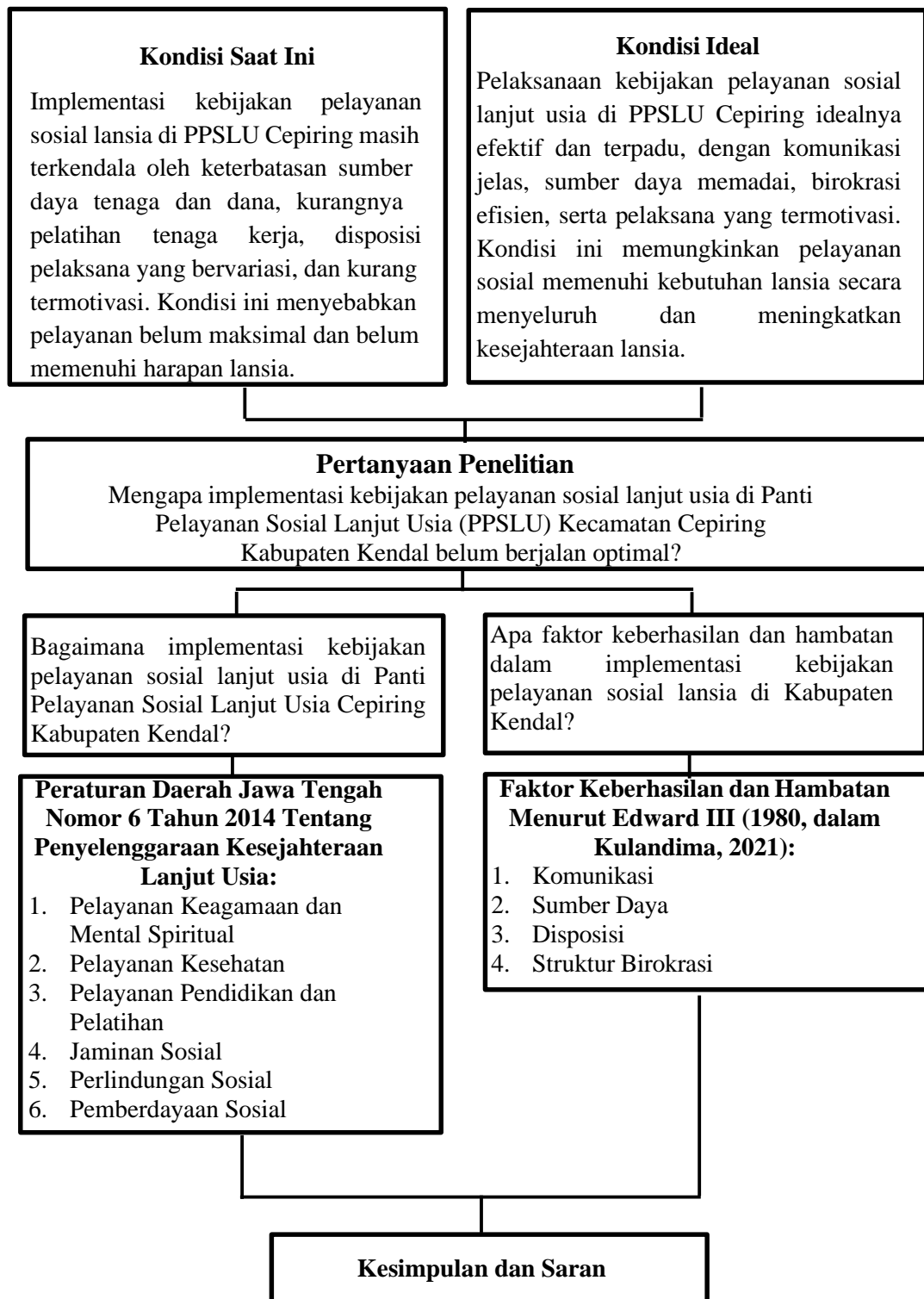
Struktur birokrasi yang baik dan efisien membantu proses penerapan kebijakan berjalan lancar. Menurut Edwards (dalam Winarno (2016 :206), pelaksana kebijakan memerlukan pengetahuan, keinginan, dan sumber daya yang cukup untuk menggerakkan birokrasi, dengan dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) serta fragmentasi. SOP berfungsi sebagai ukuran dasar dalam organisasi publik maupun swasta, memanfaatkan waktu secara efisien dan menyeragamkan tindakan pejabat untuk mencapai tujuan bersama. Fragmentasi terjadi ketika bidang-bidang birokrasi saling

bertentangan demi mempertahankan fungsi masing-masing, menolak koordinasi antarunit, dan dipengaruhi kelompok kepentingan. Konsekuensi terburuknya adalah penghambatan koordinasi, padahal kebijakan kompleks memerlukan penyebaran wewenang dan sumber daya yang terkoordinasi dengan baik.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia sangat bergantung pada sinergi keempat faktor tersebut. Pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap proses implementasi untuk mengidentifikasi kendala dan memperkuat faktor pendorong agar kebijakan tetap efektif dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia. Pemahaman terhadap faktor pendorong dan penghambat ini diperlukan dalam merancang intervensi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

## 1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir



## 1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan beragama</li> <li>- Pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.</li> </ul>
	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya promotif dan preventif yang dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)</li> <li>- Pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan.</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan.</li> </ul>
	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat</li> <li>- Mengembangkan pendidikan karakter, terutama penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para lanjut usia</li> </ul>
	Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan</li> <li>- Tunjangan berkelanjutan.</li> </ul>
	Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan harian lanjut usia</li> <li>- Pelayanan sosial melalui keluarga sendiri</li> <li>- Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti</li> <li>- Pemakaman lansia</li> </ul>

	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian motivasi</li> <li>- Pelatihan ketrampilan</li> <li>- Pendampingan</li> </ul>
Faktor Pendorong dan Penghambat Menurut Edward III (1980, dalam Kulandima et al., 2021)	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap apatis, kurangnya dedikasi, atau resistensi terhadap kebijakan yang menjadi penghambat.</li> <li>- Sikap positif, motivasi, dan komitmen dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas.</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan lansia.</li> <li>- Alokasi anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai untuk melaksanakan program.</li> </ul>
	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran komunikasi yang jelas dan efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.</li> <li>- Kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan yang disampaikan kepada seluruh pihak terkait.</li> </ul>
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi yang jelas, terintegrasi, dan mendukung koordinasi antar lembaga terkait pelayanan lansia.</li> <li>- Mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.</li> </ul>

### 1.9 Argumen Penelitian

Implementasi kebijakan pelayanan sosial lanjut usia di Panti  
Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring, Kabupaten

Kendal, merupakan aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam mengingat lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak dan kesejahteraannya. Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa meskipun terdapat regulasi dan program pelayanan sosial lansia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga kerja, sarana prasarana yang belum memadai, serta minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, penelitian ini penting agar bisa mengetahui secara rinci bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di PPSLU Cepiring serta faktor- faktor apa saja yang membantu atau menghalangi pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Menurut Abdussamad & Sik (2021) dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penelitian kualitatif menekankan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara peneliti dan subjek penelitian untuk mencapai tujuan memahami fenomena sosial secara alami. Data deskriptif dikumpulkan dalam penelitian ini. Semua fungsi dalam dokumen, fungsi, kualitas, atau atribut objek yang diteliti akan termasuk dalam penelitian, meskipun mungkin ada tambahan atau perubahan selama proses penelitian.

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebijakan pelayanan sosial bagi lansia diterapkan di Panti Pelayanan Sosial Lansia Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan diterapkan, hubungan antara pelaksana, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam memberikan layanan kepada orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan diterapkan, dan bagaimana pelaksana merespons kebutuhan lansia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan tersebut.

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi fisik atau tempat dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi. Ini adalah area di mana peneliti mengamati, mewawancarai, atau melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini mengambil situs penelitian di Panti Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

Lokasi penelitian dipilih di Pusat Pelayanan Sosial Lansia Unit (PPSLU) Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, karena memenuhi kriteria *purposive sampling* sebagai representasi ideal implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia tingkat provinsi. Pemilihan Kabupaten Kendal didasarkan pada posisinya sebagai wilayah prioritas Dinas Sosial Jawa Tengah dengan tingkat lansia terlantar .

Selain itu, lokasi penelitian juga dipilih karena mencerminkan kompleksitas pelaksanaan program sosial, baik dari aspek keterbatasan sumber daya, kualitas pelayanan, maupun koordinasi antar lembaga. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan sosial serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pelayanan sosial.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian disebut sebagai partisipan atau informan, yang dianggap sebagai sumber informasi yang cukup luas dan dalam mengenai fenomena yang diteliti. Dua metode yang digunakan untuk memilih subjek penelitian adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode *purposive* memilih informan berdasarkan kriteria atau

pertimbangan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian dan ciri-ciri populasi yang ingin diteliti. Sementara *snowball sampling* digunakan untuk menemukan informan tambahan melalui rekomendasi dari informan sebelumnya yang dianggap sudah mengerti atau terlibat langsung dalam pelayanan lansia di PPSLU. Teknik ini dipilih karena dapat membantu peneliti menemukan informan lain yang mungkin sulit ditemukan awalnya, tetapi memiliki pengalaman atau pengetahuan penting mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial bagi lansia.

Pemilihan informan melalui kombinasi *purposive* dan *snowball sampling* dipilih karena sifat penelitian ini yang bersifat kualitatif dan eksploratif, di mana diperlukan data mendalam dari individu yang benar-benar relevan dan terlibat langsung dengan fenomena pelayanan lansia di Pusat Pelayanan Sosial Lansia Unit (PPSLU). *Purposive sampling* memastikan bahwa informan awal, seperti petugas pelayanan sosial, koordinator program, dan pengelola PPSLU, dipilih berdasarkan kriteria spesifik seperti minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang tersebut, pengetahuan mendalam tentang kebijakan nasional pelayanan lansia, serta keterlibatan aktif dalam implementasi program harian.

Sementara itu, *snowball sampling* menjadi pelengkap esensial karena akses ke informan potensial seperti lansia penerima manfaat, keluarga mereka, atau mitra eksternal (seperti relawan komunitas) sering kali terbatas dan bergantung pada jaringan internal PPSLU. Metode ini efektif dalam konteks penelitian lapangan yang sensitif, di mana rekomendasi dari informan awal dapat membuka akses ke perspektif beragam, sehingga meningkatkan triangulasi data, validitas temuan, dan kelengkapan pemahaman tentang hambatan serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* ini dilakukan melalui pertimbangan pemilihan informan yang tepat agar dapat memberikan informasi data yang mendukung permasalahan Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial Lansia di Panti Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, yang berjumlah 7 informan, yaitu:

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

Informan	Karakteristik
Kepala Panti PPSLU Cepiring	Memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan panti, termasuk kondisi kekurangan SDM, keterbatasan fasilitas, serta kebutuhan peningkatan kapasitas staf.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Memiliki kemampuan koordinasi administratif yang kuat, menguasai prosedur tata usaha, serta mampu mengelola sumber daya dan dokumentasi secara efisien untuk mendukung aktivitas operasional.
Seksi Bimbingan dan Rehabilitas Sosial	Memahami pelaksanaan layanan bimbingan dan rehabilitasi serta hambatan teknis di lapangan.
Pekerja Sosial	Terlibat dalam proses pendampingan dan penanganan kebutuhan psikososial lansia, serta memahami mekanisme pelayanan sosial secara langsung.
Perawat	Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemantauan kondisi fisiologis lansia sehingga memahami prosedur dan standar pelayanan medis di panti.
Pramurukti/Caregiver	Bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan pelaksanaan perawatan harian sehingga mengetahui dinamika interaksi dan pelayanan langsung.
Lansia	Memiliki Pengalaman sebagai penerima layanan dan mampu memberikan perspektif mengenai pelaksanaan pelayanan melalui perspektif penerima.

#### 1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data teks dan bukan angka yang dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti analisis dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut berfungsi untuk menggambarkan serta

mempresentasikan kondisi serta masalah yang terjadi di lapangan.

1. Data utama terdiri dari kata-kata atau ucapan yang langsung diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan penting. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2021) wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi kontekstual dan mendalam dari para partisipan. Data utama penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan informan di Panti Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Cepiring, yang berbicara tentang pengalaman dan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial lansia.
2. Sumber tertulis yang meliputi dokumen resmi, jurnal, dan peraturan terkait implementasi kebijakan. Analisis dokumen ini, menurut Bowen (2009) dalam penelitiannya mengenai analisis dokumen sebagai metode penelitian kualitatif, berfungsi untuk memperkaya dan memperkuat informasi yang diambil dari wawancara. Sumber tertulis diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, dan peraturan terkait implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di PPSLU Cepiring sebagai bahan untuk memperkaya dan memperkuat

informasi dalam penelitian ini.

3. Foto atau gambar yang diambil melalui observasi lapangan seperti pendapat Creswell (2016) dalam metode penelitian, menekankan bahwa data visual dapat memberikan bukti empiris yang kuat dan melengkapi data tekstual. Foto atau gambar berfungsi sebagai data pendukung sekaligus bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan secara langsung di PPSLU Cepiring.

#### **1.10.5 Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan pendapat Soekanto (2012 :36) yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui penelusuran mendalam dan pengamatan langsung dari kegiatan pembinaan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring, Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini, informan utama di PPSLU Cepiring diwawancarai secara menyeluruh serta melalui pengamatan lanskap.

## 2. Data sekunder

Data primer yang telah diproses lebih lanjut dan disajikan oleh orang yang mengumpulkannya atau oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder. Profil organisasi, struktur organisasi, dan laporan studi dokumentasi adalah sumber data ini. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dan diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dan internet.

### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang teratur untuk mendapatkan informasi langsung atau dari sumber lain agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian. Cara ini mencakup pengamatan langsung, tanya jawab mendalam, daftar soal yang ditulis, serta pengumpulan data dari berkas-berkas atau buku referensi. Berikut ini beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian ke lapangan untuk mengamati secara langsung tingkah laku individu yang berada di lokasi penelitian Creswell (2016). Teknik ini digunakan untuk memperkuat informasi yang sudah ada, melalui

pengamatan langsung yang dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Lansia Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, untuk mengetahui aktivitas keseharian penghuni panti, interaksi antara lansia dengan pekerja sosial, serta pelaksanaan program pelayanan sosial yang berlangsung di PPSLU.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara bertanya dan menjawab langsung dengan orang yang sedang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Peneliti dapat bertemu langsung dengan partisipan, dan mewawancarai melalui telepon, ikut serta dalam wawancara kelompok (*focus group interview*), atau wawancara dalam kelompok tertentu Creswell (2016). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan kontekstual tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial bagi lansia di Panti Pelayanan Sosial Lansia Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, tantangan yang dihadapi dalam operasi, dan

kemungkinan pengembangan layanan baru.

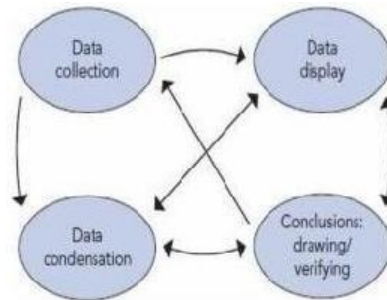
### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan melihat data dari berbagai dokumen dan sumber yang bisa ditemukan di perpustakaan. Studi dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang sudah tercatat. Dokumentasi membantu peneliti dalam mengumpulkan fakta yang relevan dengan objek penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Analisis dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan melalui pencarian informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumen yang dianalisis mencakup arsip kebijakan internal Panti Pelayanan Sosial Lansia Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, laporan tahunan, data penghuni, catatan kegiatan pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan implementasi program pelayanan lansia. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami cara pengelolaan, pelaksanaan program, serta

masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di Panti Pelayanan Sosial Lansia Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

#### **1.10.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah teknik yang digunakan untuk membagi masalah menjadi bagian yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tujuan dari proses ini adalah mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami sehingga karakteristik dan karakteristik data dapat diketahui dengan jelas dan mampu menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif menurut Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dalam dua tahap dalam penelitian kualitatif, pertama selama proses pengumpulan data, dan kedua setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Model Analisis Data dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 6 Komponen Analisis Data Model Interaktif  
 Sumber: *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*  
 (Miles et al., 2014)

Gambar di atas menunjukkan model analisis data menurut Miles dan Huberman, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses penting yang melibatkan berbagai langkah, seperti memilih, mengumpulkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dokumen, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan empiris lainnya. Proses ini berlangsung bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Ini mencakup penentuan kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Meringkas, mengkodekan, mengembangkan tema, membuat kategori, dan menyusun catatan analitis adalah beberapa contoh

proses kondensasi data. Sampai tahap penyusunan laporan akhir penelitian, proses ini masih berlanjut.

Peneliti secara aktif menentukan data mana yang perlu dikodekan, diekstraksi, serta kategori dan label yang tepat untuk menggambarkan data tersebut. Selain itu, peneliti juga memilih narasi yang akan dibangun dari data yang telah dikondensasi. Kondensasi data tidak selalu berarti melakukan kuantifikasi, melainkan dapat berupa seleksi, generalisasi, parafrase, atau pengelompokan data ke dalam rencana analisis yang lebih luas, sehingga data menjadi lebih terorganisir dan dapat diandalkan untuk penarikan kesimpulan akhir.

## 2. Tampilan Data (*Data Display*)

Tampilan data adalah penyajian informasi secara terstruktur dan ringkas sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tampilan data dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari alat sederhana hingga media sosial. Pengamatan terhadap tampilan data sangat penting bagi peneliti untuk memahami perkembangan data dan menentukan langkah analisis atau tindakan selanjutnya

berdasarkan pemahaman tersebut.

Pada masa lalu, teks kaya menjadi format dominan untuk menampilkan data kualitatif, namun format ini memiliki kelemahan seperti ukuran yang sangat besar, kurang terstruktur, dan sulit diproses secara simultan. Penggunaan teks yang ekstensif dapat menyebabkan peneliti membuat kesimpulan yang terburu-buru dan tidak akurat karena keterbatasan manusia dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, desain tampilan data yang menentukan struktur baris dan kolom serta isi data dalam setiap sel merupakan bagian integral dari proses analisis, sekaligus berperan dalam proses kondensasi data agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami dan dianalisis.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/ verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis kualitatif yang dilakukan setelah data dikumpulkan. Sejak awal, peneliti terus menerjemahkan makna dengan mencari pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, serta asumsi yang muncul dari data yang diperoleh. Meskipun kesimpulan awal mungkin masih

samar dan belum jelas, seiring bertambahnya data dan proses analisis, kesimpulan tersebut menjadi lebih terstruktur dan rasional. Proses ini sangat dipengaruhi oleh jumlah data yang dikumpulkan, metode pengkodean, kemampuan peneliti, serta batas waktu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kesimpulan tidak dapat diambil secara prematur, melainkan harus menunggu hingga data cukup untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Selain itu, verifikasi merupakan proses pengujian ulang terhadap temuan yang diperoleh untuk memastikan validitas dan keandalannya. Verifikasi dapat dilakukan secara sederhana, seperti refleksi ulang oleh peneliti, atau secara kompleks melalui diskusi mendalam dengan rekan sejawat guna mencapai konsensus intersubjektif, bahkan dengan mereplikasi penelitian pada kumpulan data lain. Tujuan dari verifikasi adalah memastikan bahwa makna yang terbentuk dari data itu benar-benar masuk akal dan dapat dipercaya secara ilmiah. Tanpa verifikasi yang cukup, hasil penelitian hanya akan menjadi cerita menarik saja, tanpa jaminan bahwa informasinya benar dan bisa digunakan secara nyata

dalam penelitian.

#### **1.10.8 Kualitas Data**

Menurut Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa validitas adalah tingkat sejauh mana data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti, dan data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Untuk memastikan validitas data, Creswell mengemukakan beberapa strategi, antara lain:

1. Triangulasi: Menggabungkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memeriksa dan menguatkan bukti, sehingga dapat membangun tema-tema yang saling terkait dari berbagai sudut pandang partisipan. Pendekatan ini meningkatkan validitas dengan mengonfirmasi data melalui beragam sumber.
2. Deskripsi Mendalam: Menyajikan uraian yang lengkap dan rinci mengenai hasil penelitian sehingga pembaca dapat memahami konteks dan isi data secara menyeluruh.

Pada penelitian ini, metode triangulasi dan deskriptif mendalam digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial terhadap lansia di PPSLU Cepiring. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang

jelas dan nyata tentang proses, tantangan, dan dinamika dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, metode deskriptif mendalam tidak hanya mengumpulkan data yang cukup dan relevan untuk analisis lebih lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kendal



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2024

Kabupaten Kendal memiliki luas sekitar 1.002,23 km<sup>2</sup> dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal adalah di antara 6032' hingga 7 024' Lintang Selatan dan 109040' hingga 110018' Bujur Timur. Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Kota Semarang berada di bagian timur, Kabupaten Semarang berada di bagian selatan, dan Kabupaten Batang berada di bagian barat. Menurut ketinggian, Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah utara terdiri dari Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah selatan terdiri dari

Plantungan, Sukorejo, Patean, Pageruyung, Singorojo, Limbangan, dan Boja.

## 2.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kendal

Kecamatan District	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2023-2024 Annual Population Growth Rate (%) 2023-2024
(1)	(2)	(3)
Plantungan	34.049	1,12
Sukorejo	61.517	0,48
Pageruyung	37.304	1,14
Patean	54.083	0,95
Singorojo	55.226	1,12
Limbangan	36.590	1,18
Boja	87.806	1,61
Kaliwungu	69.132	1,12
Kaliwungu Selatan	55.037	1,45
Brangsong	52.933	1,15
Pegandon	39.730	1,17
Ngampel	37.751	1,32
Gemuh	55.227	1,34
Ringinarum	38.509	1,29
Weleri	61.341	0,62
Rowosari	56.546	1,38
Kangkung	53.059	1,57
Cepiring	54.857	1,05
Patebon	62.128	0,86
Kendal	61.987	0,91
<b>Kabupaten Kendal Kendal Regency</b>	<b>1.064.812</b>	<b>1,14</b>

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal 2023- 2024

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Menurut data Tahun 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal mencatat 1.064.812 penduduk, dengan 536.543 laki-laki (50,39%) dan 528.269 perempuan (49,61%). Kecamatan Boja memiliki jumlah penduduk terbanyak, dengan 87.806 orang, atau 8,24% dari total penduduk Kabupaten Kendal. Kecamatan Plantungan memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan 34.049 orang, atau 3,19% dari total penduduk Kabupaten Kendal.

Berdasarkan laporan tersebut, beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi karena distribusi

penduduk yang tidak merata. Misalnya, Kecamatan Kendal dan Weleri memiliki kepadatan penduduk 2.255 orang per kilometer persegi, masing-masing, menurut data BPS Kabupaten Kendal tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan Singorojo dan Limbangan memiliki kepadatan penduduk hanya 2.255 orang per kilometer persegi.

### **2.3 Profil Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring**

Lembaga sosial Panti Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring menawarkan bantuan dan perawatan kepada orang tua yang membutuhkan, terutama mereka yang tidak memiliki keluarga atau mengalami keterbatasan fisik dan mental. Panti ini berada di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. PPSLU Cepiring memiliki luas 22.243meter persegi dan terdiri dari 17 bangunan, termasuk dua gedung kantor, aula, delapan asrama, poliklinik, mushola, ruang makan, ruang keterampilan, rumah dinas, dan ruang pemulasaraan jenazah.

Panti ini juga memiliki fasilitas seperti tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, seprei, sarung bantal, dan selimut, serta almari. Setiap asrama memiliki TV, meja dan kursi tamu, dan perlengkapan untuk minum dan makan. Rebana juga memiliki alat musik dan lapangan olahraga. Mobil dan sepeda motor yang digunakan untuk operasional rumah sakit. Fasilitas yang disediakan dalam panti mencakup ruang hunian yang nyaman,

pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan rutin oleh tenaga medis, kegiatan rekreasi seperti senam dan keterampilan tangan, serta dukungan nutrisi melalui penyediaan makanan bergizi. PPSLU Cepiring menampung sekitar seratus penghuni dan merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang tua, dengan fokus pada rehabilitasi sosial dan pencegahan pengabaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, para lansia berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan sosial yang lengkap. Lebih lanjut, lembaga ini mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur bagaimana panti sosial berfungsi sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar bagi orang-orang yang rentan. Selain itu, peraturan utama untuk operasi lembaga tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Kedua peraturan memastikan bahwa panti memenuhi standar minimum fasilitas, tenaga kerja, dan pemantauan berkala untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia penghuni.

## **2.4 Tugas dan Fungsi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia**

### **Cepiring**

Dinas Sosial Kabupaten Kendal bertanggung jawab atas Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur fungsi utama lembaga ini.

#### **2.4.1 Tugas**

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring melindungi dan merawat lansia yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang tidak memiliki keluarga yang bisa menemani atau yang mengalami masalah fisik dan mental. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, tugas ini termasuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman, memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, dan memungkinkan pencegahan penyakit yang sering menyerang lansia.

#### **2.4.2 Fungsi**

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring merupakan lembaga yang membantu masyarakat, terutama lansia yang membutuhkan. Di sini, lansia mendapatkan

perlindungan, perawatan, dan bantuan pemulihan, baik yang tidak memiliki keluarga maupun yang mengalami gangguan fisik atau mental.

a. Perlindungan dan Perawatan Lansia

Memberikan tempat tinggal yang aman serta perawatan sehari-hari untuk lansia yang tidak memiliki keluarga atau mengalami kesulitan, sehingga kebutuhan dasar seperti kebersihan dan pemantauan kesehatan dapat terpenuhi.

b. Layanan Kesehatan Dasar

Menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, dan koordinasi dengan fasilitas medis terdekat untuk menjaga kondisi fisik dan mental penghuni.

c. Rehabilitasi Sosial

Melakukan kegiatan rehabilitasi untuk membantu lansia beradaptasi dengan lingkungan, termasuk pelatihan keterampilan hidup sehari-hari dan dukungan psikologis.

d. Kegiatan Rekreasi dan Sosialisasi

Mengorganisir aktivitas seperti senam, kerajinan tangan, dan acara sosial untuk mencegah isolasi dan meningkatkan kualitas hidup penghuni.

e. Dukungan Nutrisi dan Gizi

Menyediakan makanan bergizi yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, serta pendidikan tentang pola makan sehat untuk mencegah malnutrisi.

## **2.5 Visi dan Misi Pantii Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring**

### **2.5.1 Visi**

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

### **2.5.2 Misi**

1. Membangun masyarakat Jawa tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

## **2.6 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pantii Pelayanan Sosial Lansia (PPSLU) Cepiring terdiri dari Kepala Pantii, yang juga memimpin beberapa

bagian, seperti Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Penyantunan dan Rujukan, dan Sub Bagian Tata Usaha. Gambar 2.1 menunjukkan struktur organisasi panti tersebut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring

Sumber: PPSLU Cepiring

#### A. Kepala / Ketua Panti

##### 1. Tugas

Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan panti lansia.

##### 2. Fungsi

Bertanggung jawab atas kebijakan operasional, pengambilan keputusan strategis, serta sebagai penanggung jawab utama pelayanan dan administrasi di lingkup panti.

#### B. Sub Bagian Tata Usaha

##### 1. Tugas

Mengelola seluruh administrasi, arsip, dan surat- menyurat internal maupun eksternal panti.

Membantu penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.

## 2. Fungsi

) Mendukung kelancaran operasional organisasi melalui pengelolaan administrasi dan dokumentasi

Menjadi pusat informasi serta pelayanan administratif bagi seluruh unit kerja.

## C. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1. Tugas

Melaksanakan tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing dan tugas jabatan fungsional yang telah disesuaikan (misal: perawat, pekerja sosial, konselor).

Memberikan pelayanan teknis kepada penerima manfaat secara profesional.

### 2. Fungsi

Mendukung pelaksanaan tugas pokok yang memerlukan keterampilan atau keahlian khusus sesuai bidangnya.

Menyumbang keahlian dalam pelayanan sosial, kesehatan, atau psikososial secara langsung.

#### D. Seksi Penyantunan dan Rujukan

##### 1. Tugas

Melaksanakan pelayanan kesejahteraan dasar, pemenuhan kebutuhan harian, dan penanganan kasus penerima manfaat.

Melakukan rujukan atau koordinasi layanan lain bagi lansia yang memerlukan perawatan khusus.

##### 2. Fungsi

Menjamin lansia mendapatkan bantuan sosial, sandang- pangan, dan kebutuhan pokok.

Menjadi penghubung dengan lembaga/instansi terkait untuk keperluan rujukan lanjutan (misal rumah sakit, Dinsos).

#### E. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

##### 1. Tugas

Menyusun dan melaksanakan program pembinaan, pelatihan, serta rehabilitasi sosial bagi lansia.

Melakukan bimbingan psikis, sosial, dan aktivitas untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

## 2. Fungsi

Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui kegiatan pembinaan mental, keterampilan, dan sosial.

Mengarahkan penerima manfaat agar mampu beradaptasi, bersosialisasi, dan memperoleh rehabilitasi secara optimal.